



"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "

"PENGEMBANGAN POSDAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA"

Oleh

"Ahmad Sabiq & Agoeng Noegroho"

"FISIP Unsoed"

"sabiq_ahmad@yahoo.com"

ABSTRAK

Proses pembangunan di daerah otonomi baru penting untuk terus di dukung secara partisipatif sehingga permasalahan, potensi dan prospek di masyarakat dapat dibuat dalam bentuk pemberdayaan. Terdapat tiga pilar pemberdayaan yang sudah teruji dapat mensejahterakan masyarakat yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terhimpun dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengembangan Posdaya di daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian menggunakan studi kasus, pengumpulan data melalui observasi langsung, analisis dokumentasi, wawancara mendalam dan *Participatory Decision Making* (PDM). Pemilihan informan secara purposif yaitu pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pengurus Posdaya. Lokasi penelitian di Desa Cintaratu dan Desa Karangbenda yang diproyeksi akan menjadi pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran. Penelitian menggunakan analisis interaktif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi, verifikasi, triangulasi, katagorisasi, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Posdaya baru berdiri selama dua tahun, sehingga masih membutuhkan program pemberdayaan secara komprehensif mulai penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan khususnya tentang manajemen Posdaya, pembuatan program dan peningkatan kompetensi pengurus bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (2) Posdaya bidang ekonomi menjadi potensi prospektif yang dapat dikembangkan dengan pemberdayaan dan kemitraan yaitu khususnya lokasi wisata alam Jojogan yang dapat menjadi bagian dari paket destinasi wisata Pangandaran.

Kata kunci: *daerah otonomi, kemitraan, masyarakat, pembangunan desa, posdaya*

ABSTRACT

The development process in the new autonomous region is important to continue to be supported in a participatory manner so that problems, potential and prospects in the community can be made in the form of empowerment. There are three pillars of empowerment that have been proven to prosper the community, namely the fields of education, health and economics that are gathered in the Family Empowerment Post. The study was aim to analyze the development of Posdaya in the new autonomous region of Pangandaran Regency. The research used qualitative method of case studies, data collection through direct observation, documentation analysis, in-depth interviews and *Participatory Decision Making* (PDM). The informants was selection through purposive sampling, namely the village government, community leaders, and Posdaya administrators. The research sites in Cintaratu Village and Karangbenda Village are projected to become the center of the capital of Pangandaran Regency. The study used interactive analysis with the stages of



collecting data, reducing, verification, triangulation, categorization, and conclusion. The results show that (1) The Posdaya has been established for two years, so it still requires a comprehensive empowerment program starting with counseling, training, and mentoring specifically about Posdaya management, program making and enhancing the competency of the management in the fields of health, education and economics. (2) The Posdaya in the economic field becomes a prospective potential that could be developed with empowerment and partnerships, specifically the Jojogan natural tourism location which can be part of the Pangandaran tourism destination package.

Keywords: autonomous region, community, partnership, Posdaya, village development

PENDAHULUAN

Konsep dasar paradigma pembangunan yang bersifat sentralisme atau terpusat (*top down*), telah bergeser ke paradigma pembangunan partisipatif (*bottom up*) seiring dengan tuntutan dan tantangan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah. Kemudian konsep pemerintahan yang harus melakukan pelayanan publik (*public service*) yang baik dan prima, bergeser ke konsep pemberdayaan masyarakat (*empowering people*). Begitupun dengan adanya kesempatan yang lebih luas dari aspirasi masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk, tuntutan atau kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan, yaitu dengan melakukan pemekaran daerah atau membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kajian Adriansyah yang dikutip Ratnawati (2010) tentang perkembangan pemekaran daerah antara tahun 1999 hingga 2009, berdasarkan data yang bersumber dari Depdagri tahun 2009 telah terbentuk 205 daerah baru yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Maka jumlah daerah otonomi di Indonesia hingga Oktober 2009 adalah 424 buah yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.

Namun berdasarkan hasil evaluasi Depdagri terhadap 148 kabupaten atau kota pemekaran tahun 2005 diketahui 87,71% daerah induk belum menyelesaikan penyerahan pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen (P3D) kepada daerah otonomi baru, 79% daerah otonomi baru belum memiliki batas wilayah yang jelas, 89,48% daerah induk belum memberi dukungan dana kepada daerah otonomi baru sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang pembentukan, 84,2% menghadapi kendala dalam mutasi daerah induk ke daerah otonom baru, 22,8% pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi, dan 91,23% daerah otonomi baru belum mempunyai Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Kemudian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun 2007 menyimpulkan mengenai buruknya kinerja keuangan daerah-daerah pemekaran. Selain mengandalkan dana dari pusat, daerah baru hasil pemekaran juga kekurangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dan terdapat sekitar 83% dari 148 daerah hasil pemekaran, kondisi keuangan daerahnya tidak memenuhi syarat. Moratorium merupakan cara efektif untuk memberi kesempatan kepada pemerintah pusat untuk membantu menata kembali manajemen daerah-daerah pemekaran yang sebagian besar bermasalah dengan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto

melakukan evaluasi, supervisi, dan pembenahan yang diperlukan (Ratnawati et al. 2009). Perkembangan selanjutnya ada sembilan belas daerah otonomi baru yang diusulkan dan disetujui DPR pada rapat Paripurna 4 April 2012, namun pada akhirnya dalam rapat Paripurna DPR 25 Oktober 2012 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan lima Daerah Otonom Baru yaitu : Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua barat.(sumber : www.dpr.go.id).

Terbukanya kesempatan yang lebih luas atas aspirasi untuk melakukan pemekaran daerah, sebagai perwujudan dari semangat reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah, dengan harapan yaitu : Pertama, mewujudkan pembangunan yang lebih adil, sejahtera dan merata dengan konsep otonomi pembangunan dari bawah ke atas. Pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik dengan konsep dan pelaksanaan pembangunan dari pusat ke daerah atau dari atas ke bawah dimana pihak pemerintah pusat lebih dominan. Maka pembangunan di daerah diharapkan bisa memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan program pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan sampai ditingkat desa. Menurut Purwaningsih (2008) pendekatan partisipasi sangat penting mengingat masyarakat di daerah yang lebih tahu dan mampu mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan wilayahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan penilaian suatu pembangunan. Kedua, Pemekaran daerah lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat (*bring the government closer to the people*), meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi ditingkat lokal. (Ratnawari et al. 2009).

Dengan demikian pemekaran daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik (*public service*) yang lebih baik, efektif dan efisien sehingga lebih dekat, cepat, dan mudah bagi masyarakat di daerah. Ketiga, pemekaran daerah juga diharapkan mewujudkan paradigma pemerintah yang tidak hanya hanya melakukan pelayanan publik, akan tetapi melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di daerah. Sehingga semua potensi dan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah dapat dikelola, dimanfaatkan dan membawa kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagai perwujudan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Partisipasi dalam pembangunan sebagai proses mengaktifkan atau memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mengelola pembangunan mereka sendiri dan pada akhirnya meningkatkan kemandirian dan memperoleh arti kekuatan sendiri. Hal ini menurut pendapat White dan Patel (2004) "*Participation in development is seen by many as a process of enabling or empowering rural people to manage their own development and ultimately increase self-reliance, independence, and gain a sense of power*". Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk dilaksanakan diantaranya melalui program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) sebagai forum komunikasi, advokasi, edukasi, dan koordinasi kegiatan penguatan fungsi keluarga



secara terpadu di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan (Amin 2012; Hidayati 2013; Triyono 2014; Muljono et al. 2016; Syamsuadi & Zainuddin 2018).

Maka menjadi hal yang sangat penting dan menarik untuk diteliti tentang pengembangan Posdaya di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pemekaran dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pemekaran daerah, yang menurut Hidayat et al. (2007) daerah pemekaran rata-rata mengalami per-tumbuhan pengeluaran yang lebih besar dari pertumbuhan penerimaan yang mengindikasikan keti-daksiapan kabupa-ten/kota pemekaran masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi. Hasil Pusat Penelitian Politik dari LIPI Tahun 2009 (Ratnawati et al. 2009) bahwa munculnya "etalase" pembangunan fisik yang cenderung irasional, proyek-proyek mercusuar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memboroskan APBD. kemudian Pemborosan APBD untuk kepentingan birokrasi dan pejabat daerah.

Hasil audit BPK (2007) sekitar 83% dari 148 daerah hasil pemekaran, kondisi keuangan daerahnya tidak memenuhi syarat. Hasil riset Tim Kompas (2008) terdapat daerah induk atau daerah pemekarannya justru mengalami kemunduran pasca-pemekaran sebesar 72% dari 233 daerah pemekaran dan daerah induk yang diteliti. Sulaiman et al. (2016) pemekaran daerah belum dapat memberdayakan masyarakat secara partisipatif dan masih kuat kepentingan elit lokal dan pusat. Kajian Sari (2018) bahwa moratorium pemekaran daerah disebabkan menimbulkan beban anggaran negara pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintahan yang dikelola belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lebih kental kepentingan elit.

Kemudian permasalahan dalam partisipasasi Posdaya diantaranya rendahnya tingkat komunikasi, keterlibatan masyarakat belum maksimal, partisipasi masih lemah, rendahnya motivasi dan sikap apatis masyarakat (Muljono 2010; Satriani et al. 2011; Naufal & Kusumastuti 2010; Syamsuadi & Zainuddin 2018). Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan dalam proses pembangunan di pemekaran daerah, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Posdaya di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pemekaran dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat desa?" Maka tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengembangan Posdaya di Desa Cintaratu dan Desa Karangbenda Kecamatan Parigi sebagai proyeksi daerah ibukota Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pemekaran dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus yaitu jenis kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara terinsi, mendalam dan intensif perihal fenomena, aktivitas, realitas, program



baik individu, kelompok atau lembaga dengan tujuan mendapatkan data, pengetahuan dan konstruksi makna secara mendalam (Sugiono 2018).

Lokasi di Kecamatan Parigi sebagai ibu kota dan pusat pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang difokuskan di dua lokasi yaitu: (1) Desa Karangbenda dengan pertimbangan sebagai tempat sementara kantor bupati ketika masa transisi. (2) Desa Cintaratu sebagai proyeksi lokasi kantor bupati masa depan.

Subjek penelitian ditentukan dengan purposive sebanyak 30 orang informan dari dua lokasi desa yang terdiri dari pemerintah desa, pengurus dan anggota Posdaya, kelompok usaha, serta tokoh masyarakat baik tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh agama. Usaha.

Penelitian memperoleh data melalui wawancara secara mendalam, observasi langsung dan *Participatory Decision Making* (PDM). Menggunakan analisis interaktif dengan tahapan merediksi data, verifikasi dan triangulasi data, katagorisasi serta penarikan kesimpulan (Moleong 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuntutan dan tantangan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah merubah paradigma pembangunan sentralisme (*top down*) menjadi partisipatif (*bottom up*), dari pelayanan publik (*public service*) bertambah untuk pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) seperti melalui program Posdaya sebagai forum komunikasi, advokasi, edukasi, dan koordinasi kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Termasuk kesempatan bagi aspirasi masyarakat, bertambahnya penduduk, dan tuntutan atau kebutuhan pelayanan publik yang lebih baik dengan adanya pemekaran daerah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) walaupun sudah di moratorium tahun 2014. Maka menjadi penting dan menarik meneliti tentang strategi pengembangan Posdaya di Kabupaten Pangandaran sebagai daerah pemekaran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Proses Penelitian Pemberdayaan

Penyusunan proposal penelitian ini, melalui proses studi pendahuluan pada tahun 2018-2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Tim peneliti melakukan diskusi untuk mengkaji dan merumuskan fenomena atau gejala sosial politik yang menjadi pusat perhatian dan sangat strategis atau penting dalam skala nasional. Melakukan pengkajian yang bersumber dari pustaka baik hasil penelitian, jurnal ilmiah, media massa dan buku referensi serta rekam jajak tim peneliti melakukan riset. (2) Tim peneliti merumuskan dan menentukan tema, kasus dan fokus penelitian yang sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan landasan bagi penelitian terapan serta penelitian lanjutan yaitu tentang strategi pengembangan Posdaya di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat sebagai daerah pemekaran daerah atau DOB menjadi isu dan wacana yang sangat penting dan strategis sekalipun sedang di Moratorium.



Kabupaten Pangandaran merupakan DOB terdekat atau dekat dengan perbatasan Jawa Tengah, serta sebagai objek pariwisata tingkat nasional, bahkan internasional.

Penelitian ini memiliki urgensi yaitu, (1) Penelitian ini sangat penting dan strategis, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk merancang teori atau model baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui paradigma pembangunan partisipatif di suatu daerah transisi seperti daerah pemekaran dengan menggunakan metode Research and Development.

(2) Hasil temuan dan rancangan strategi atau model pemberdayaan masyarakat dalam Posdaya dalam paradigma pembangunan partisipatif dapat dijadikan landasan bagi penelitian terapan dan penelitian lanjutan.

(3) Pemekaran daerah sedang di moratorium, namun akan terus menjadi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era demokratisasi, reformasi serta otonomi daerah seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pertumbuhan penduduk, kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin baik, cepat, efektif dan efisien, serta percepatan pembangunan demi pemerataan kesejahteraan. Sebagaimana wacana yang terus berkembang tentang pemekaran Kabupaten Banyumas yang akan membentuk Kota Purwokerto.

(4) Memilih lokasi daerah pemekaran Kabupaten Pangandaran, dikarenakan sebagai daerah pemekaran yang lolos dari fase moratorium dan di tengah prestasi kurang baik pembangunan di daerah pemekaran di Indonesia.

Kemudian Kabupaten Pangandaran merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan sebagai kawasan yang sudah dikenal sebagai daerah pariwisata dengan memiliki potensi 10 wisata pantai, kelautan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Begitupun menurut hasil penelitian Nugroho et al. (2013) bahwa Pangandaran sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan daya tarik yang beragam, sehingga prospektif untuk pengembangan ekowisata.

Pengembangan Posdaya dalam mendukung Ekowisata

Pos pemberdayaan Keluarga (Posdaya) menjadi pilar penting dan strategis dalam pembangunan masyarakat desa dengan memfokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga perlu mendapat perhatian dan strategi dalam pengembangan Posdaya terutama melibatkan partisipasi semua pihak baik masyarakat desa, pemerintah desa, kelompok usaha dan akademisi. Menurut Triyono (2014) strategi Posdaya berbasis pada empat pilar, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan dengan tahapan dilakukan dengan tahapan analisis kebutuhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang akan menjadi subjek pelaksana Posdaya. Dalam melaksanakan kegiatan Posdaya tersebut dijalankan dengan kegiatan CSR, dan menjalin hubungan dengan komunitas, pemerintah dan LSM, berpusat pada community relation department PT Holcim. Mujiburrahmad dan Firmansyah (2014) menyatakan Posdaya sebagai media komunikasi untuk partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan kemiskinan melalui pemantapan fungsi keluarga dan pencapaian target kesejahteraan masyarakat.



Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian aktivitas untuk memperkuat dan mengoptimalkan daya masyarakat melalui konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang didalamnya terdapat nilai-nilai sosial dengan berpusat pada rakyat, partisipatif dan berkesinambungan (Sopandi 2010). Pemberdayaan masyarakat memiliki strategi yaitu (1) Proses perubahan dan memerlukan inovasi berupa ide tau gagasan, produk, metode, peralatan dan teknologi dengan kajian serta pengembangan kebiasaan, nilai, tradisi pada kearifan lokal (*indigenous technology*). (2) Proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan (*sustainable development*) jangka panjang. Lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi, (Mardikanto & Soebiato 2012).

Masih terdapat permasalahan Posdaya dalam bidang pendidikan yaitu (1) Kekurangan tenaga pendidik di PAUD, (2) Belum ada APE (Alat Peraga Edukasi), (3) Fasilitas yang kurang mendukung keamanan bagi peserta PAUD, dan (4) Tidak adanya sarpras berupa gedung PAUD sehingga PAUD masih membagi waktu operasional dengan TPQ atau Madrasah Diniyah. Terbatasnya jumlah SDM yang terlibat dalam posyandu dan kegiatan pendukung posyandu (misalnya senam lansia). Belum ada fasilitas umum yang merupakan gabungan antara pelayanan kesehatan lansia dan balita. Fasilitas MCK yang ada belum difungsikan secara maksimal, masyarakat ingin agar fasilitas MCK memberi manfaat yang optimal; pegiat desa belum bisa mensosialisasikan bagaimana MCK yang baik dan pentingnya menjaga MCK sebagai fasilitas yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama. Fasilitas posyandu yang dimiliki dirasa masih sangat minim.

Posdaya bidang ekonomi masih mengalami kendala seperti tidak ada pembukuan administasi atau pencatatan keuangan, tidak adanya perencanaan usaha yang berkelanjutan, modal sendiri, tidak ada bantuan pihak manapun, keluhan pemasaran, masih di lingkungan sendiri, modal kurang, sehingga masih membutuhkan modal tambahan, kesulitan bahan baku terutama bawang, belum punya pengalaman usaha, dan ada pesaing abon dari Bantul Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka strategi pengembangan Posdaya dapat dilakukan dengan (1) Bidang pendidikan Posdaya dapat melakukan audiensi dengan pihak desa tentang kebutuhan PAUD dan perlunya melakukan penilaian terhadap PAUD (identifikasi kondisi riil), serta mengusulkan kepada kepala desa untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana PAUD. Meningkatkan sarana atau fasilitas pendidikan khususnya taman bermain dan sarana bermain anak-anak PUD dan TK di Desa. Peningkatan mutu tenaga pengajar pendidikan Usia dini dan metode pengajaran yang lebih baru/inovatif.

Bidang kesehatan dalam Posdaya dengan meningkatkan strata posyandu dari madya menjadi purnama atau mandiri dengan melakukan survei mandiri guna memetakan masalah yang sekiranya dapat meningkatkan skor pada strata posyandu tersebut. Mengusulkan kepada kepala desa untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana posyandu berdasarkan hasil survei di atas,



Berkoordinasi dengan Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan posyandu balita sekaligus dengan kegiatan posbindu. Mengusulkan kepada Puskesmas untuk mengadakan pelatihan kader dalam penggunaan posbindu kit/perengkapan, Bekerja sama dengan sanggar/instruktur senam guna peningkatan kegiatan fisik pada posyandu lansia, Penyuluhan dari kader pelatihan mendalam terhadap kader dari puskesmas, pengolahan sampah dengan manajemen Bank Sampah, pembuatan tempat pembuatan sampah di setiap RT, peningkatan kesadaran Posyandu Lansia (Senam lansia, cek kesehatan).

Bidang ekonomi dengan peningkatan keterampilan manajemen keterampilan UKM, bantuan atau pinjaman permodalan (untuk UKM) pelatihan kewirausahaan (kripik singkong dll, kue basah, pecel) kualitas produksi, pengembangan potensi wisata alam (ekowisata) berbasis partisipatif. Perbaiki infrastruktur jalan untuk akses ke lokasi wisata. Produk usaha Abon Sapi (blm ada komposisi), kripik ,opak, jus honje, hola Juice (pengembangan produk, pemasaran), bantuan dan pinjaman lunak permodalan usaha.

Menindaklanjuti kerjasama yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Desa Cintaratu khususnya tentang pengembangan ekowisata Jojogan supaya lebih banyak pengunjung dengan promosi dan manajemen kepariwisataan. Menurut Muljono et al. (2016) Posdaya memerlukan pembinaan lebih lanjut khususnya pada sasaran masih lemahnya kinerja, terutama pada bidang kemitraan atau kerjasama melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan kader Posdaya yang diselenggarakan oleh berbagai pihak seperti unsur perguruan tinggi, pemerintah daerah/kota, dan perusahaan swasta.

Namun pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dari 3 bidang, peneliti memfokuskan terlebih dahulu pada bidang ekonomi dalam pengembangan wisata alam di Jojogan yaitu kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, potensi dan prospek wisata alam Jojogan, Membuat program pengembangan wisata alam (Ekowisata) khususnya tentang strategi promosi dan pemasaran melalui media sosial baik melalui media Instagram dan website serta membuat dan menyebarkan brosur Wisata Jojogan ke Hotel dan rumah makan di kawasan wisata Pangandaran yang akan disebar atau disimpan di resepsionis hotel-hotel dan rumah makan di lokasi objek wisata Pangandaran.

Menurut Muljono (2010) dan Satriani et al. (2011), bahwa pentingnya ada upaya penelitian Posdaya untuk menganalisis mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posdaya. Dikarenakan sasaran akhir dari Posdaya adalah membentuk sumber daya manusia dalam masyarakat yang bermutu dan sejahtera. Naufal dan Kusumastuti (2010) faktor yang mendukung kegiatan Posdaya yaitu (1) Gotong royong masyarakat masih tinggi, (2) Rasa kebersamaan yang kuat, (3) Lamanya tinggal, (4) Kesiapan SDM untuk melaksanakan program Posdaya, (5) Mempunyai lahan kosong walaupun tidak banyak, dan (6) Sarana dan prasarana. Fiati dan Latifah (2013) Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga



dan menjadi desa Mandiri yang dapat bersinergi, kolaborasi dan kerjasama program antar sektor, masyarakat dan pemerintah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) masih relatif baru sehingga membutuhkan penyuluhan dan pelatihan manajemen peningkatan pengetahuan dan kemampuan manajemen organisasi untuk pengembangan Posdaya yaitu :

(1) Bidang pendidikan dengan melakukan penambahan kuantitas dan kualitas guru atau pengajar melalui pelatihan dalam metode pengajaran, pembuatan kurikulum dan fasilitas PAUD.

(2) Bidang kesehatan meliputi tenaga dokter dan kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang budaya hidup sehat bagi ibu-ibu hamil dan menyusui serta manula.

(3) Bidang ekonomi dengan melakukan pelatihan pengembangan media promosi dan pemasaran melalui media sosial bagi lokawisata Jojogan sebagai destinasi baru yang menarik, kemudian produk kelompok usaha Abon Sapi dan Minuman Jus Hola (Honje Laka) Sari Honje yang dapat dijadikan produk khas dan unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(4) Membutuhkan sinergitas dan kerjasama antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan program pengembangan Posdaya secara berkesinambungan.

(5) Hasil Penelitian telah dipublikasikan di media sosial website dan instagram, serta membuat dan menyebarkan brosur promosi ekowisata Jojogan yang berlokasi di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucap syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unsoed yang atas kebijakannya telah mendanai penelitian kami sehingga kami dapat berkarya nyata sebagai kontribusi pada lembaga Unsoed dan masyarakat. Kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada informan dan pemerintah desa tempat lokasi penelitian kami yaitu di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi referensi perkualihan, kajian dan riset lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. 2012. Konsep Dakwah Melalui Program Posdaya Berbasis Masjid: Suatu Kajian Metode Dakwah bi al-Hāl. *Jurnal Dakwah Tabligh*. 13(1): 97-108.

Fiati, R., & Latifah. N., 2013. Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kelayakan Desa Mandiri Menggunakan FMADM. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer*. Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unnes, 23 November 2013, 137-141. ISBN 978-602-14724-4-6



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto

- Hidayat, S. 2007. *Too Much Too Soon: Local State-Elite's Perspective on and the Puzzle of Contemporary Indonesia's Regional Autonomy*, Pt. Rajwali Press. Jakarta.
- Hidayati, E. 2013. Efektivitas KKN Tematik Posdaya Berbasis Masjid Bagi Pemberdayaan Masyarakat. *Ar-Risalah*, 12(2):12-23.
- Mardikanto, T & Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung .
- Moleong, L.J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Mujiburrahmad & Firmansyah. 2014. Hubungan Faktor Individu Dan Lingkungan Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Kasus Kampung Sengked, RT 03/RW 03 Desa Babakan Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor). *Jurnal Agrisep*. 15(1): 47-66.
- Muljono, P. 2010. Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga). *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 23(1): 9-16.
- _____, Sadono, D., & Burhanuddin. 2016. Evaluasi Kinerja Posdaya sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 18(2): 123-130.
- Naufal, A & Kusumastuti, Y.I. 2010. Evaluasi Program Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) :Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 6(2): 1-16.
- Nugroho, P., Yusuf, M., & Suryono. 2013. Strategi Pengembangan Ekowisata di Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Pasca Tsunami. *Journal Of Marine Research*. 2(2): 11-21.
- Purwaningsih E. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jantra Jurnal Sejarah dan Budaya*. 3(6) : 443-352.
- Ratnawati T., Afdlal., Letty., Nyimas., Latifah, A. 2009. *Studi Tentang Pemekaran Daerah : Pemetaan Problematika Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya di Daerah-Daerah Pemekaran Era Reformasi: Upaya Menuju Penyusunan Konsep Alternatif* . LIPI Pr. Jakarta
- _____,2010. *Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi : Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik : Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Pustaka Pelajar, Edisi 21 : 114-134. ISSN 0854-6029. Yogyakarta .
- Sari, D.R. 2018. *Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI. [Internet] di unduh <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1248-menyoal-moratorium-pemekaran-daerah>
- Satriani, I., Muljono, P., & Lumintang, R.W.E. 2011. Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga: Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 9(2): 17-27.
- Sopandi, A. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kybernan*. 1(1): 40-56.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto

- Sugiono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, A.I., Lubis, D.P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. 2016. Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. 31(2): 367-378 .
- Syamsuadi., & Zainuddin, M. 2018. Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial dan Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2): 98-109.
- Triyono, A. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap. *Jurnal KomuniTi*, 9(2): 11-121.
- White R . Patel. 2004. *Participatory Message Making wiht Video : Revelations from Studies in India and the USA*. White S A, Nair K S, Ascroft J, editor. Participatory Communication : Working for Change and Development. New Delhi, Thousand Oaks, Sage Publication. London.

Sumber lain:

- <http://www.dpr.go.id/id/berita/baleg/2012/apr/05/3778/seluruh-fraksi-setujui-pembentukan-19-daerah-otonom-baru>."Seluruh Fraksi Setujui Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru", diakses 3 Februari 2018.
- <http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2012/okt/25/4612/dpr-setujui-ruu-pembentukan-5-daerah-otonom-baru>. "DPR Setujui RUU Pembentukan 5 Daerah Otonomi Baru", diakses 3 Februari 2018.
- Peraturan Pemerintah No 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto
